

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu membutuhkan sarana dan prasarana demi mewujudkan kesejahteraannya. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan sifatnya yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan melakukan upaya-upayanya dengan menggunakan sarana, yaitu barang dan jasa. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk mencari kebahagiaan dan menjaga kelangsungan hidup.

Saat ini salah satu kebutuhan manusia yang paling banyak dicari adalah kebutuhan elektronik. Peralatan elektronik sangat dibutuhkan karena dapat mempermudah pekerjaan manusia atau memenuhi keperluan hidupnya. Semakin meningkatnya permintaan manusia akan elektronik maka semakin meningkat pula aktivitas pengangkutan, karena pengangkutan memegang peranan yang penting dalam mengantarkan barang dari pihak satu ke pihak yang lain.

Dilihat dari objeknya pengangkutan terbagi menjadi dua yaitu pengangkutan barang dan orang atau penumpang. Di Indonesia pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara, karena letak geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau baik besar maupun kecil. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk bangsa Indonesia yang hampir 258,7 juta jiwa pada tahun 2016 dan tersebar di berbagai kepulauan membuat lalu lintas

transportasi terus meningkat.<sup>1</sup> Dengan banyaknya barang-barang dan penumpang yang memerlukan angkutan, maka banyak pula perusahaan-perusahaan jasa angkutan melalui darat, laut dan udara.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>2</sup> Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan (surat muatan atau *vrachtbrief*) dalam Pasal 90 KUHD yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan.
- (2) Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.
- (3) Objek hukum pengangkutan, yaitu barang yang di angkutan.
- (4) Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.

---

<sup>1</sup> <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penduduk-indonesia-dan-pertumbuhannya-2007-2016-1499396486> diakses pada 7 November 2018

<sup>2</sup> H.M.N Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 3 Hukum Pengangkutan*”, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 2.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Pengangkutan Niaga*”, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

- (5) Hubungan hukum dengan pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

Di dalam dunia perdagangan, peranan pengangkutan bersifat mutlak karena perusahaan tanpa pengangkutan tidak mungkin dapat berjalan. Dengan pengangkutan, barang-barang yang dihasilkan produsen atau perusahaan akan sampai ke tangan pedagang dan dari pedagang atau pengusaha ke tangan konsumen. Pengangkutan dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk mengangkut barang atau orang sampai di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba atau sampai di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Para pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim, baik pengangkut maupun pengirim berdasarkan perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajibannya. Menurut H. M. N Purwosutjipto, pengangkutan bukanlah orang yang menjalankan kendaraan atas perintah pengangkut, tetapi pengangkut adalah orang yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Op.cit.* hlm. 12.

Kewajiban lain dari pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dengan selamat. Sebagai konsekuensi kewajiban pengangkut maka pihak pengirim mempunyai kewajiban membayar uang angkutan atau biaya pengiriman. Dalam penyelenggaraan pengiriman atau paket barang, jika pengirim akan mengirimkan barangnya lewat jasa perusahaan pengangkutan, maka setelah barang diserahkan, pihak perusahaan pengangkutan akan menerima barang atau paket tersebut, dan sejak itu, tanggung jawab mengenai barang atau paket tersebut ada di pundak perusahaan pengangkutan.

Perusahaan pengangkutan tersebut telah menerima barang elektronik untuk dititipkan dari orang atau perusahaan yaitu pihak pengirim. Selanjutnya perusahaan pengangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan atau bertanggung jawab untuk mengirim barang ke tempat tujuan dengan selamat. Hal ini berarti bahwa perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang dan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang ke tangan penerima.

Ketika dalam perjalanan tersebut pengemudi angkutan barang mengalami suatu kecelakaan akibat kelalaian yang berdampak pada suatu kerusakan barang (kardus basah, penyok, bahkan sampai konslet ketika digunakan), keterlambatan (tidak sesuai jadwal kedatangan) dan/atau kehilangan (barang di bawa lari pengemudi), maka hal itu juga akan menjadi tanggung jawab pengangkut. Namun batasan mengenai tanggung jawab tersebut selalu ada. Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor,



dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang - Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Selanjutnya Pasal 234 ayat (3) Undang - Undang Lalu Lintas Angkutan

Jalan menyebutkan bahwa :

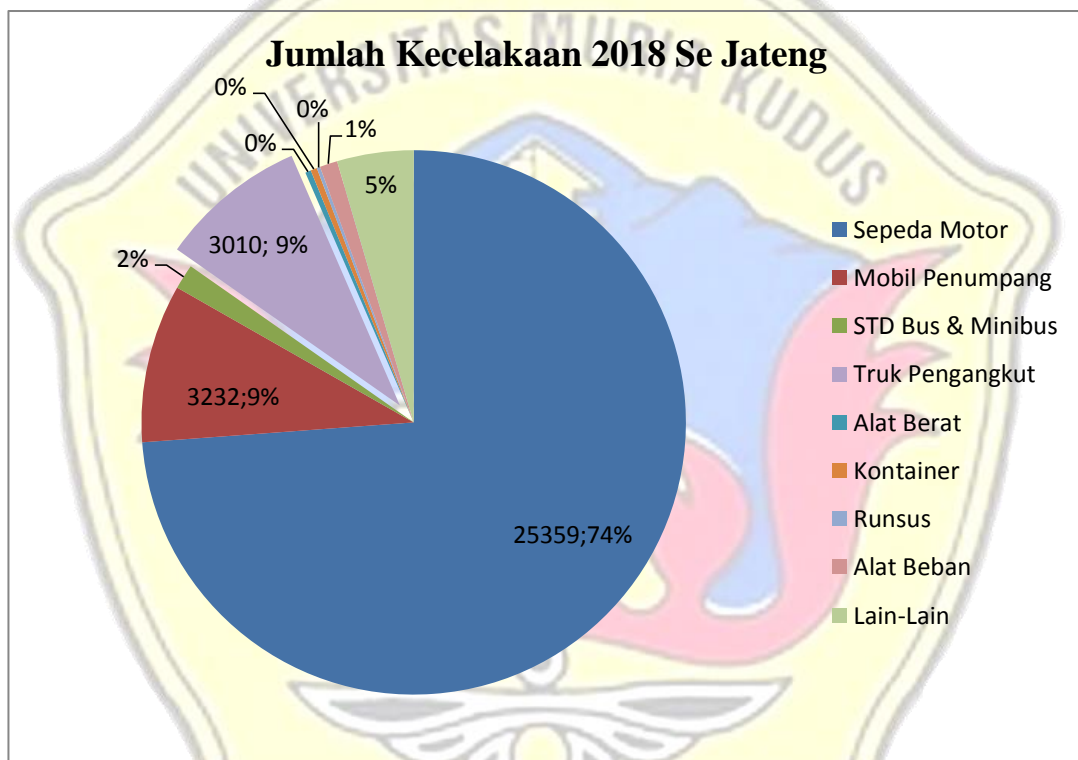
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:

- a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi.
- b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c) Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 234 ayat (3), membuat beberapa perusahaan pengangkutan yang tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diangkutnya. Batasan inilah yang membuat perusahaan bisa mengelak untuk bertanggung jawab, atau bertanggung jawab tetapi tidak semestinya. Misalnya, perusahaan pengangkutan mengangkut barang dari Kudus ke Jakarta, dalam perjalanan pengemudi mengantuk dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan beberapa barang rusak. Seharusnya perusahaan pengangkutan bertanggung jawab penuh dalam kerusakan yang diakibatkan, akan tetapi beberapa perusahaan mengelak karena adanya faktor jalanan yang buruk sehingga terjadi *overmacht* dan perusahaan pengangkutan tidak diwajibkan bertanggung jawab.

Apabila perusahaan pengangkutan ingin meminta pertanggungjawaban pengemudi atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan pengemudi bertanggungjawab, maka perusahaan pengangkutan tersebut dapat mengajukan tuntutan perdata kepada pengemudi tersebut karena dianggap telah melanggar standar operasional ataupun kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam menjalankan pengangkutan.

Gambar 1 : Jumlah Kecelakaan tahun 2018 Se Jateng



Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Lalu Lintas

Berdasarkan data yang penulis ambil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Lalu Lintas bahwa kecelakaan terbesar ke 3 dialami oleh truk pengangkut, dengan jumlah 3010 kendaraan, kemudian disusul oleh mobil penumpang, yang berjumlah 3232, dan sepeda motor dengan

jumlah 25.359. Besarnya angka kecelakaan, terutama truk pengangkut barang menunjukkan kurangnya kehati-hatian pengemudi dalam berkendara, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu Kabupaten dengan kegiatan pengangkutan barang terbesar ialah Kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan karena faktor utama penyangga perekonomian Kabupaten Kudus ialah industri, terbukti dengan sumbangan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan sektor yang lain.<sup>5</sup> Sektor industri ini didominasi oleh industri rokok dan elektronik. Polytron atau PT. Hartono Istana Teknologi adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri elektronik dengan semua proses pembuatan, pengembangan, perakitan, hingga desain produk di lakukan di Kabupaten Kudus. Polytron juga merupakan salah satu penguasa pasar elektronik di Indonesia, dibawah PT. Hartono Istana Teknologi ada PT. Sarana Kencana Mulya yang merupakan distributor dari produk polytron. Berdasarkan penjelasan Bapak Suko sebagai Kepala Bagian Kendaraan PT. Sarana Kencana Mulya bahwa setiap bulannya ada 900 – 1200 kegiatan pengangkutan.<sup>6</sup>

Hal tersebut juga membuat banyak perusahaan pengangkutan khususnya di Kabupaten Kudus yang telah melakukan perjanjian pengangkutan dengan PT. Sarana Kencana Mulya selaku distributor dari produk Polytron di bawah PT. Sarana Kencana Mulya. Berikut adalah daftar perusahaan pengangkutan di

---

<sup>5</sup> [http://www.kuduskab.go.id/p/173/industri\\_dan\\_perkembangannya](http://www.kuduskab.go.id/p/173/industri_dan_perkembangannya) di akses pada 7 November 2018

<sup>6</sup> Suko, “Wawancara pribadi” Kepala Bagian Kendaraan, 12 Februari 2019, PT. Sarana Kencana Mulya, Kudus

Kabupaten Kudus yang telah melakukan perjanjian dengan PT. Sarana Kencana Mulya:

1. PT. Himalaya
2. PT. Langgeng Sari
3. PT. Roda Jaya
4. PT. Bintang Wijaya
5. PT. Wahyu Jaya
6. PT. Dhanoe Putra
7. PT. Raja Transport
8. PT. Persatuan
9. Borneo Trans
10. Berlian Jaya Trans
11. Alex Jaya
12. Mustika Candra
13. Gondangmanis
14. PT. Java Andalas
15. Garasi Sumber Madu
16. Langgeng Sari Trans
17. Burhan Trans
18. Mugi Jaya

Dalam pelaksanaannya pengangkutan atas perusahaan-perusahaan angkutan di atas, saat perusahaan angkutan mengangkut barang elektronik beberapa kali mengalami kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengemudi. Perusahaan



pengangkutan yang mengalami kecelakaan sebagai akibat dari kelalaian pengemudi antara lain, kesalahan saat mendahului kendaraan lain, kurang hati-hati saat berbelok, Pengemudi yang mengantuk atau bahkan mengebut karena dikejar target.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI KABUPATEN KUDUS TERHADAP PENGIRIMAN BARANG ELEKTRONIK JIKA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI” studi kasus pengangkutan barang elektronik melalui Polytron.

## **B. PERUMUSAN MASALAH :**

Pembahasan dalam skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENGIRIMAN BARANG ELEKTRONIK JIKA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI” studi kasus pengangkutan barang elektronik melalui Polytron ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Elektronik Melalui Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Kudus ?

---

<sup>7</sup> Aris Widayanto, “Wawancara pribadi” Kepala Oprasional Kendaraan, 23 April 2019, di kantor UD. Mustika Candra, Kudus.

2. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Terhadap Pengiriman Barang Elektronik Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengiriman barang elektronik melalui perusahaan pengangkutan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap pengiriman barang elektronik jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan kegiatan penelitian mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Kudus Terhadap Pengiriman Barang Elektronik Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi studi kasus pengangkutan barang elektronik melalui Polytron, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada hukum dagang umumnya dan khususnya dalam bidang pengangkutan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada :

- a) Perusahaan pengangkutan, khususnya dalam pengangkutan

barang elektronik yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian pengemudi sehingga diharapkan dapat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kemudian hari.

b) Pengemudi yang lalai saat berkendara, sehingga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kemudian hari.

c) Pengirim, memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam menuntut hak dan kepentingannya serta tercipta rasa keadilan dan keseimbangan hak.

d) Pemerintah, dapat memberikan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perusahaan pengangkutan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi skripsi ini maka dalam sub bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi, yang antara bab 1 (satu) dengan bab berikutnya saling berkaitan:

BAB I, Pada bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang membahas tentang seputar langkah awal dilaksanakannya penelitian, bab ini berisi mengenai, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. bab ini di harapkan bisa untuk mengantar lebih lanjut ke bab-bab lainnya.

BAB II, dikemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang pengangkutan, tinjauan umum tentang tanggung jawab, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas.

BAB III, Dalam bab ini menggambarkan tentang metode penelitian hukum yaitu meliputi, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV, Pada pembahasan bab ini, membahas yang merupakan pokok inti dari skripsi ini mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan di kabupaten kudus terhadap pengiriman barang elektronik jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi studi kasus pengangkutan barang elektronik melalui polytron.

BAB V, Dalam bab ini berisi mengenai pokok inti pada bab-bab yang telah di bahas pada bab sebelumnya yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran-sarannya.